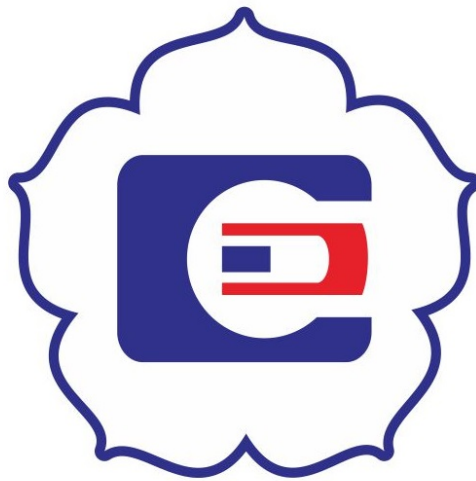


**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT.BPR CITRA DARIAN
TAHUN 2025**



**Jl.Utama Timur No.125 Weleri - Kendal
TELEPON: 0294643267**



1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT.BPR Citra Darian
Alamat	Jl.Utama Timur No.125 Weleri - Kendal
Nomor Telepon	0294643267

Penjelasan Umum:

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, dan untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip GCG sebagaimana disebut didalam POJK No 9 thn 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR yang pelaksanaannya diatur dalam SEOJK No 12 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh jenjang tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

GCG adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran.

Pelaksanaan GCG bagi BPR menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri. Memastikan penerapan 5 prinsip dasar GCG, setiap Bank harus melakukan penilaian sendiri secara berkala yang paling kurang meliputi 12 Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu :

1. Aspek Pemegang Saham
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi.
3. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris.
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
5. Penanganan benturan kepentingan.
6. Penerapan fungsi kepatuhan.
7. Penerapan fungsi audit intern.
8. Penerapan fungsi audit ekstern.
9. Penerapan manajemen risiko, strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern.
10. Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR.
11. Integritas Pelaporan dan sistem informasi teknologi; dan
12. Rencana Bisnis BPR.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik
--	---------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi



1.	Nama	PARWANTI,SH,MM
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:	
	<ol style="list-style-type: none">1. Anggota Direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.2. Memenuhi syarat kompetensi dan integritas serta lulus Fit and Proper Test dari OJK.3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;4. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Tata Kelola BPR secara menyeluruh dalam organisasi BPR.5. Menindaklanjuti temuan audit intern dan Auditor Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau Otoritas dan lembaga lain;6. Mengevaluasi dan memantau tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh PE Audit Intern;7. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan dan petugas yang bertanggung jawab APU PPT & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), Fungsi Penerapan Strategi Anti Fraud, Fungsi Pencegahan Kecurangan / Manipulasi Informasi Keu Laporan Keuangan Bank;8. Menyediakan data dan informasi terkait BPR yang akurat, relevan dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan;9. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai;10. Mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi Bank agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi Bank;11. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai UU dan Anggaran Dasar;12. Dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sbb :<ol style="list-style-type: none">a. proyek bersifat khusus;b. didasari perjanjian tertulis yang jelasc. konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi utk mengerjakan proyek yg bersifat khusus.13. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :<ol style="list-style-type: none">a. Pengaturan etika kerja.b. Waktu kerja.c. Pengaturan rapat.	
2.	Nama	ELI NUR IDA,SE,MM,AKT
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:	
	<ol style="list-style-type: none">1. Menerapkan Tata Kelola BPR pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.2. Melakukan pengawasan secara menyeluruh atas semua kegiatan oleh semua unit kerja yang ada dlm melaksanakan Tata Kelola BPR.3. Memantau seluruh laporan yang disampaikan ke OJK yang berhubungan dengan seluruh tugas dan laporan yg mjd kewajiban BPR.4. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.5. Menindaklanjuti seluruh temuan pemeriksaan dan rekomendasi dari PE Audit Intern maupun dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK.6. Memberikan saran dan masukan kepada Direktur Utama dalam rangka pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas yang bersifat operasional yang	



- berhubungan erat dengan pelaksanaan Tata Kelola.
7. Mengkoordinasikan semua kegiatan unit kerja yang berada dibawah koordinasinya dalam rangka optimalisasi dlm menjalankan Tata Kelo a secara menyeluruh.
 8. Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan semua unit kerja terkait dlm melaksanakan semua kebijakan yang telah ditetapkan manajemen yang berhubungan langsung dengan Tata Kelola.
 9. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan Otoritas lain;
 10. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yg relevan;
 11. Melaporkan kpd anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
 12. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yg dilakukan oleh Direksi BPR.
 13. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
 14. Menyusun ketentuan dan pedoman internal bank, meminimalkan risiko kepatuhan bank.
 15. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan atau keputusan yang diambil tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Direksi telah melakukan evaluasi laporan keuangan tahunan tahun buku 2024, melakukan penagihan intensif untuk menurunkan NPL.
2. Direksi telah melakukan evaluasi laporan kepatuhan terhadap risk appetite dan risk tolerance.
3. Direksi telah melakukan evaluasi aplikasi perhitungan CKPN.
4. Direksi telah melakukan evaluasi laporan keuangan posisi bulan Mei 2025, telah memberikan arahan terhadap tim pemasaran agar pencairan kredit sesuai target yang ditetapkan.
5. Direksi telah melakukan evaluasi laporan SPI agar sesuai ketentuan OJK tentang laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern.
6. Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan OJK untuk segera menindaklanjuti dan melakukan perbaikan sehingga ke depan tidak terjadi temuan yang sama.
7. Direksi telah melakukan sosialisasi edukasi literasi, inklusi keuangan dan sosialisasi Strategi Anti Fraud (SAF) sesuai jadwal yang telah direncanakan.
8. Direksi telah melakukan evaluasi laporan pencapaian RBB posisi bulan Agustus 2025, meningkatkan jumlah rekening tabungan pihak ketiga bisa bertambah sesuai target RBB.
9. Direksi melakukan evaluasi kertas kerja SPI.
10. Direksi telah melakukan pelatihan APU PPT san SAF untuk pengurus dan karyawan.
11. Direksi telah menindaklanjuti pengawasan terhadap kredit sindikasi yang berpotensi penyumbang NPL besar.
12. Direksi telah melakukan evaluasi pencapaian RBB posisi bulan November 2025.
13. Direksi telah melakukan evaluasi laporan SPI, peningkatan fungsi audit intern sehingga bisa mengantisipasi jika ada penyelewengan.
14. Direksi telah melaporkan RBB tahun 2026 sebelum tanggal 15 Desember 2025.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	DR.ARDANI IKA S,SE,MM,AKT
----	------	---------------------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
2. Wajib memenuhi syarat kompetensi dan integritas serta lulus Fit and Proper Test



dari OJK.

3. Melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan prinsip kehati-hatian Bank.
4. Wajib memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya.
5. Dilarang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang perbankan.
6. Mengungkapkan kepada BPR atas kepemilikan saham baik saham BPR maupun pada perusahaan lain.
7. Bertanggung jawab sesuai ketentuan atau Undang-undang dan Anggaran Dasar BPR.
8. Bertanggung jawab thdp pelaksanaan Komisarisan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eskternal dan OJK.
9. Wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.
10. Wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
11. Wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas:
 - a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern; dan
 - b. Hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas dan lembaga lain,
12. Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan OJK mengenai BMPK BPR dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Wajib menyusun, menetapkan, mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
14. Wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2.

Nama

WINARNO HADIREDDJO,SE,AKT

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
2. Wajib memenuhi syarat kompetensi dan integritas serta lulus Fit and Proper Test dari OJK.
3. Melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian Bank.
4. Wajib memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya.
5. Dilarang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang perbankan.
6. Mengungkapkan kepada BPR atas kepemilikan saham baik saham BPR maupun pada perusahaan lain.
7. Bertanggung jawab sesuai ketentuan atau Undang-undang dan anggaran dasar BPR.
8. Bertanggung jawab thdp pelaksanaan Komisarisan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eskternal dan OJK.
9. Wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.
10. Wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
11. Wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas:
 - a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat



- yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern; dan
- b. Hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas dan lembaga lain,
 12. Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan OJK mengenai BMPK BPR dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Wajib menyusun, menetapkan, mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
 14. Wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rekomendasi Kepada Direksi:

1. Direksi melakukan evaluasi laporan keuangan tahunan tahun buku 2024, mengevaluasi kebijakan pemberian kredit, meningkatkan penyaluran kredit baru untuk menurunkan NPL dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
2. Direksi melakukan evaluasi laporan kepatuhan.
3. Direksi melakukan evaluasi aplikasi perhitungan CKPN
4. Direksi melakukan evaluasi laporan keuangan posisi bulan Mei 2025 perlu meningkatkan arahan kepada tim pemasaran kredit agar pencairan sesuai target yang ditetapkan.
5. Direksi melakukan evaluasi laporan SPI agar sesuai ketentuan OJK tentang laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern.
6. Direksi membahas hasil temuan pemeriksaan OJK untuk segera menindaklanjuti dan melakukan perbaikan sehingga ke depan tidak terjadi temuan yang sama.
7. Direksi segera melakukan edukasi literasi, inklusi keuangan dan sosialisasi Strategi Anti Fraud (SAF) sesuai yang telah direncanakan.
8. Direksi melakukan evaluasi laporan pencapaian RBB posisi bulan Agustus 2025.
9. Direksi melakukan evaluasi kertas kerja SPI.
10. Direksi melakukan pelatihan APU PPT dan SAF untuk pengurus dan karyawan.
11. Direksi melakukan pengawasan terhadap kredit sindikasi yang berpotensi penyumbang NPL besar.
12. Direksi melakukan evaluasi pencapaian RBB posisi bulan November 2025.
13. Direksi melakukan evaluasi laporan SPI, peningkatan fungsi audit intern sehingga bisa mengantisipasi jika ada penyelewengan.
14. Direksi segera melaporkan RBB tahun 2026 yang telah disetujui sebelum tanggal 15 Desember 2025.

NIHIL

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	DR.ARDIANI IKA S,SE,MM,AKT
	Persentase Kepemilikan (%)	25,00

Komisaris Utama (DR. Ardiani Ika S,SE,MM,Akt) dan sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT. BPR Citra Darian.



7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	DR. Ardiani Ika S,SE,MM,Akt
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Weleri Jaya Persada
	Persentase Kepemilikan (%)	6,51
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	6,51
2.	Nama	DR. Ardiani Ika S,SE,MM,Akt
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Dhana Adiwerna
	Persentase Kepemilikan (%)	17,50
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	17,50
3.	Nama	DR. Ardiani Ika S,SE,MM,Akt
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera
	Persentase Kepemilikan (%)	22,26
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	22,26

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

1.	Nama	Sri Marwati,MM
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Weleri Jaya Persada
	Persentase Kepemilikan (%)	13,19
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	13,19
2.	Nama	Sri Marwati,MM
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera
	Persentase Kepemilikan (%)	8,28
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	8,28
3.	Nama	Sri Marwati,MM
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Dhana Adiwerna
	Persentase Kepemilikan (%)	22,50
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	22,50



4.	Nama	Arief Himmawan DN,SE,MM,Akt
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Weleri Jaya Persada
	Persentase Kepemilikan (%)	25,01
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	25,01
5.	Nama	Arief Himmawan DN,SE,MM,Akt
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera
	Persentase Kepemilikan (%)	22,26
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	22,26
6.	Nama	Arief Himmawan DN,SE,MM,Akt
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Dhana Adiwerna
	Persentase Kepemilikan (%)	25,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	25,00
7.	Nama	Tri Kartika S, Sp.A
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Weleri Jaya Persada
	Persentase Kepemilikan (%)	3,84
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	3,84
8.	Nama	Tri Kartika S, Sp.A
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera
	Persentase Kepemilikan (%)	25,02
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	25,02
9.	Nama	Tri Kartika S, Sp.A
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Dhana Adiwerna
	Persentase Kepemilikan (%)	17,50
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	17,50
10.	Nama	Teguh Imam Prabowo,ST,MM
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Weleri Jaya Persada
	Persentase Kepemilikan (%)	3,84
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	3,84
11.	Nama	Teguh Imam Prabowo,ST,MM
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera



	Persentase Kepemilikan (%)	22,19
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	22,19
12.	Nama	Teguh Imam Prabowo,ST,MM
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Dhana Adiwerna
	Persentase Kepemilikan (%)	17,50
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	17,50

DR. Ardiani Ika S,SE,MM,Akt (Komisaris Utama) sekaligus Pemegang Saham Pengendali (PSP) dengan kepemilikan saham (25%), Sri Marwati,MM (22,50%), Arief Himmawan DN,SE,MM,Akt (17,50%), Tri kartika S, SpA (17,50%), Teguh Imam Prabowo,ST,MM (17,50%).

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	DR.ARDIANI IKA S,SE,MM,AKT
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. BPR Dhana Adiwerna
	Persentase Kepemilikan (%)	17,50
2.	Nama	DR.ARDIANI IKA S,SE,MM,AKT
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera
	Persentase Kepemilikan (%)	22,26
3.	Nama	DR.ARDIANI IKA S,SE,MM,AKT
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. BPR Weleri Jayapersada
	Persentase Kepemilikan (%)	6,51

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki saham diperusahaan lain.

Ardiani Ika Sulistyawati selain Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali PT.BPR Citra Darian, mempunyai Saham di PT.BPR Dhana Adiwerna (17,50%), PT.BPR Arthanugraha Makmursejahtera (22,26%) dan PT.BPR Weleri Jaya Persada (6,51%).

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	PARWANTI,SH,MM
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada



	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	ELI NUR IDA,SE,MM,AKT
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Arief Himmawan Dwi Nugroho, SE,MM,Akt - Suami

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	DR.ARDANI IKA SULISTYAWATI,SE,MM,AKT
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	WINARNO HADIREDDJO,SE,AKT
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	Arief Himmawan Dwi Nugroho, SE,MM,Akt
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Arief Himmawan Dwi Nugroho, SE,MM,Akt (Pemegang Saham) merupakan suami dari Direktur (Eli Nurida) dan memiliki hubungan keuangan.
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Parwanti (Direktur Utama) tidak memiliki hubungan keuangan dengan Eli Nur Ida (Direktur), Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Eli Nur Ida (Direktur) tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris tetapi memiliki hubungan keuangan dengan Arief Himmawan Dwi Nugroho (Pemegang Saham).



Ardiani Ika Sulistyawati (Komisaris Utama) dan Winarno Hadiredjo (Komisaris) tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi dan Pemegang Saham PT.BPR Citra Darian.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	PARWANTI,SH,MM
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	ELI NUR IDA,SE,MM,AKT
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	DR. Ardiani Ika Sulistyawati,SE,MM,Akt - Saudara Ipar
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Arief Himmawan Dwi Nugroho,SE,MM,Akt - Suami, DR. Ardiani Ika Sulistyawati,SE,MM,Akt - Saudara Ipar, Dra. Sri Marwati, MM - Mertua, Dr. Tri Kartika Sulistyorini, SpA - Saudara Ipar, Teguh Imam Prabowo,ST,MM - Saudara Ipar

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	DR.ARDIANI IKA S,SE,MM,AKT
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	ELI NUR IDA,SE,MM,AKT - SAUDARA IPAR
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Dra.SRI MARWATI,MM - ORANG TUA, ARIEF HIMMAWAN DWI NUGROHO,SE,MM,AKT - SAUDARA KANDUNG, Dr.TRI KARTIKA SULISTYORINI - SAUDARA KANDUNG, TEGUH IMAM PRABOWO,ST,MM - SAUDARA KANDUNG
2.	Nama	WINARNO HADIREDDJO,SE,AKT
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada



Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Eli Nur Ida (Direktur) memiliki hubungan keluarga dengan Ardiani Ika Sulistyawati (Komisaris Utama) dan memiliki hubungan keluarga dengan Sri Marwati (Pemegang Saham) mertua, Ardiani Ika Sulistyawati (Pemegang Saham Pengendali) saudara ipar, Arief Himmawan Dwi Nugroho (Pemegang Saham) suami, Tri Kartika Sulistyorini (Pemegang Saham) saudara ipar, Teguh Imam Prabowo (Pemegang Saham) saudara ipar. Ardiani Ika Sulistyowati (Komisaris Utama) memiliki hubungan saudara ipar dengan Eli Nur Ida (Direktur) namun tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris bersifat independen ini dapat menciptakan Check and Balance, menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan stakeholders.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp579.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp371.050.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp94.872.582
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp34.260.000

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp12.062.500
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp7.712.500



1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp162.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang



Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0
--	-----

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp14.400.000
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	1 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp7.125.000

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp64.790.000
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan RUPS.
Fasilitas lain yang diterima tahun 2025 antara lain :
Inventaris Handphone 2 Direksi pembelian 09 Agustus 2023
Pulsa 2 Direksi : Rp 7.200.000,-
Bensin 2 Direksi : Rp 57.590.000,-

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	2,13 : 1
-------------	----------

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	1,24 : 1
-------------	----------

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	1,24 : 1
-------------	----------



4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) 1,56 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) 3,87 : 1

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perbulan dengan ketentuan bahwa pegawai yang dimaksud adalah pegawai tetap.

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	20 Maret 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan: 1. Evaluasi Laporan Tahunan Tahun buku 2024. 2. Evaluasi Laporan Kepatuhan 3. Evaluasi aplikasi perhitungan CKPN.		
2.	Tanggal Rapat	30 Juni 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan: 1. Evaluasi Laporan Kinerja bulan Mei tahun 2025 2. Evaluasi Laporan SPI 3. Membahas hasil pemeriksaan OJK 4. Edukasi Literasi, inklusi keuangan dan sosialisasi Strategi Anti Fraud.		
3.	Tanggal Rapat	27 September 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan: <ul style="list-style-type: none">Evaluasi laporan pencapaian RBB bulan Agustus 2025Pelatihan APU PPT dan SAFMembahas kredit sindikasi		
4.	Tanggal Rapat	08 Desember 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan: <ul style="list-style-type: none">Evaluasi laporan pencapaian RBB hingga bulan November 2025.Evaluasi laporan SPIRBB tahun 2026 ke OJK		

NIHIL



14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	DR.ARDIANI IKA S,SE,MM,AKT
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	WINARNO HADIREDDJO,SE,AKT
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

NIHIL

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus



Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0 kasus



Pada Tahun Sebelumnya	
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

NIHIL

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai	
Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian	
Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

1.	Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Sri Marwati
	Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Pemegang Saham
	Nama Pengambil Keputusan	Parwanti
	Jabatan Pengambil Keputusan	Direktur Utama
	Jenis Transaksi	Perjanjian Sewa Gedung Kantor Pusat
	Nilai Transaksi	Rp275.000.000
	Keterangan: Sewa Gedung Kantor Pusat dengan Jangka Waktu 5 (lima) tahun dengan nominal Rp 275.000.000,-	
2.	Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Eli Nurida
	Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Direktur
	Nama Pengambil Keputusan	Parwanti
	Jabatan Pengambil Keputusan	Direktur Utama
	Jenis Transaksi	Sewa Mobil Innova



Nilai Transaksi	Rp6.500.000
Keterangan: Direktur (Eli Nurida) tidak ikut dalam pengambil keputusan sewa mobil dengan nilai transaksi Rp 6.500.000,-/bulan.	
3. Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Ardiani Ika Sulistyawati
Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Komisaris Utama
Nama Pengambil Keputusan	Parwanti dan Winarno Hadiredjo
Jabatan Pengambil Keputusan	Direktur Utama dan Komisaris
Jenis Transaksi	Sewa Mobil Innova
Nilai Transaksi	Rp7.000.000
Keterangan: Komisaris Utama (DR.Ardiani Ika Sulistyawati) tidak ikut dalam pengambil keputusan sewa mobil dengan nilai transaksi Rp 7.000.000,-/bulan.	

Perjanjian Sewa Gedung Kantor Pusat, transaksi sewa mobil innova untuk Direktur Utama, transaksi sewa mobil innova untuk Direktur.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1. Tanggal Pelaksanaan	12 Desember 2025
Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
Penerima Dana	PERBARINDO
Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Bencana Banjir Sumut, Sumbar, Aceh.
Jumlah (Rp)	Rp1.000.000

NIHIL

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT.BPR Citra Darian untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Weleri, 02 April 2026

PT.BPR Citra Darian



Parwanti, SH, MM
Direktur Utama

DR. Ardiani Ika Sulistyawati, SE, MM, Akt
Komisaris Utama